

## Budget Brief

# *Vitamin*

# **A** **NGGARAN**

*Mengandung SUPLEMEN KHUSUS  
Bagi WAKIL RAKYAT  
Yang Peduli RAKYAT*

Perhatian

Penting **dibaca** sebelum  
sidang Pembacaan Nota Keuangan

## PANDANGAN FITRA ATAS RAPBN 2011: “Meretas APBN untuk Sebesar-besarnya Kemakmuran Rakyat”

- *RAPBN tahun 2011 merupakan salah satu wujud realisasi komitmen Pemerintahan* terpilih sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2010-2014 yang dijabarkan pada Rencana Kerja Pemerintah tahun 2011.
- *Penyusunan RAPBN sepatutnya diarahkan dalam rangka mencapai tujuan bernegara dalam rangka memenuhi amanat konstitusi.* Sudah seharusnya Pemerintah menguraikan Nota Keuangan RAPBN 2011 berdasarkan kewajiban Negara untuk memenuhi hak-hak warga Negara sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi, yaitu bahwa APBN diperuntukan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (pasal 23 ayat 1 UUD'45).
- *Tetapi politik anggaran masih didominasi birokrasi anggaran yang ditandai dengan kebijakan anggaran yang bersifat incremental.* Tanpa ada mekanisme *reward and punishment* bagi Kementerian/ Lembaga yang memperoleh opini hasil audit buruk.
- *Sehingga arah Kebijakan dan Politik anggaran belum menunjukkan ke-saling-keterkaitan dan keterpaduan antara Nasional dan Daerah,* antar sektor dan Kementerian/ Lembaga.

### A. Kerangka Ekonomi Makro dan Arah Kebijakan Fiskal 2011

No.	Asumsi	KEM dan PPKF	Kesepakatan Pemerintah dan Badan Anggaran
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	6,2 - 6,4	6,1 - 6,4
2	Inflasi (%)	4,9 - 5,3	4,9 - 5,3
3	Nilai Tukar (Rp/US\$)	9.100,0 - 9.400,0	9.100,0 - 9.400,0
4	Tingkat Suku bunga SBI 3 Bln (persen)	6,3 - 6,7	6,2 - 6,5
5	Harga Minyak (US\$/barell)	80,0 - 85,0	75,0 - 90,0
6	Liftng Minyak (ribu barell/hari)	960,0 - 980,0	960,0 - 975,0

- ***Asumsi ekonomi makro yang digunakan belum mencerminkan realitas sosial di masyarakat.*** Seharusnya indikator asumsi ekonomi makro perlu mencantumkan indikator target penurunan angka kemiskinan, tingkat pengangguran dan indeks gini ratio.
- ***Asumsi pertumbuhan ekonomi yang diajukan Pemerintah tidak menceritakan realitas kesenjangan yang terjadi di daerah.*** Pemerintah telah mengklaim setiap satu persen pertumbuhan ekonomi akan menyerap tenaga kerja 400.000, sehingga diasumsikan akan ada 2% lapangan kerja baru setiap tahunnya. Pertumbuhan ekonomi tahun 2008 misalnya, sebanyak 22 daerah berada dibawah rata-rata pertumbuhan ekonomi Nasional. Sebanyak 14 daerah berada dibawah rata-rata angka pengangguran tahun 2008 8,4%, bahkan angka pengangguran di Banten hampir mencapai dua kali lipat dari angka pengangguran Nasional.
- ***Pemerintah seharusnya menguraikan kontribusi pertumbuhan ekonomi makro masing-masing wilayah,*** sehingga pertumbuhan ekonomi nasional juga memperlihatkan pertumbuhan ekonomi antar daerah beserta kesenjangan.
- ***Cerminan angka pertumbuhan ekonomi juga tidak memiliki korelasi dengan angka kemiskinan dan Indeks Pembangunan Manusia.*** Pemerintah dapat mengklaim pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat, namun tidak mampu mempengaruhi angka kemiskinan turun signifikan, bahkan peringkat Indeks Pembangunan Manusia kita terus terpuruk, Tahun 2006, Indonesia berada di peringkat ke-107, merosot ke peringkat ke-109 pada tahun 2007-2008, dan pada 2009 menjadi peringkat ke-111. Bahkan lebih buruk dari peringkat Palestina (110) dan Sri Lanka (102) yang sedang dilanda konflik.
- ***Target pengurangan kemiskinan setiap tahun juga harus tercermin kontribusi antar daerah dalam pengurangan kemiskinan.*** Pemerintah Pusat boleh saja menetapkan target pengurangan kemiskinan 3 % setiap tahunnya, namun jika ini tidak tercermin dari pengurangan kemiskinan daerah, maka angka ini hanyalah angka di atas kertas
- ***Angka inflasi 4,9 – 5,3 % yang diasumsikan Pemerintah adalah angka yang sangat optimis tetapi tidak realistis.*** Prakteknya dari tahun ke tahun Pemerintah selalu merevisi inflasi menjadi lebih tinggi seiring kebijakan perubahan anggaran. Tahun 2010, sebelum kebijakan kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL), harga sembako telah meroket di pasaran. Oleh karenanya, angka inflasi yang optimis juga harus didukung oleh kebijakan fiskal Pemerintah yang menyentuh akar masalah inflasi, seperti perbaikan infrastuktur jalur distribusi sembako, depot logistik dan pengendalian pasar yang komprehensif. Kebijakan Fiskal juga harus memperhatikan implikasi terhadap inflasi, pencabutan subsidi tanpa kebijakan *safety guard* berkontribusi pada tingginya angka inflasi.
- ***Lifting minyak berkaitan dengan pendapatan dari sektor Migas perlu mendapat pengawasan secara ketat,*** mengingat block cepu sudah mulai berproduksi namun pendapatan SDA mengalami penurunan.

## B. Struktur dan Arah Kebijakan Pendapatan APBN 2011

APBN TAHUN 2008-2010, APBN-P TAHUN 2010 DAN RAPBN 2011  
(Rp. Triliun)

	2008	2009	2010	2010	2011
			APBN	APBN-P	RAPBN
<b>A. Pendapatan Negara dan Hibah</b>	981,6	869,6	949,7	992,4	1.086,7
<b>I. Penerimaan Dalam Negeri</b>	979,3	868,5	948,1	990,5	1.083,4
<b>1. Penerimaan Perpajakan</b>	658,7	641,4	742,7	743,3	839,9
<b>2. Penerimaan Negara Bukan Pajak</b>	320,6	227,1	205,4	247,2	243,5
<b>II. Hibah</b>	2,3	1,1	1,5	1,9	3,2
<b>B. Belanja Negara</b>	985,8	957,5	1.047,7	1.126,1	1.204,9
<b>I. Belanja Pemerintah Pusat</b>	693,4	648,9	725,2	781,5	840,9
<b>II. Transfer ke Daerah</b>	292,4	308,6	322,4	344,5	364,1
<b>C. Surplus/Defisit</b>	-4,1	-87,8	-98,0	-133,7	-118,3
<b>persen Terhadap PDB</b>	-0,1	-1,6	-106	-2,1	-1,7
<b>D. Pembiayaan</b>	84,3	111,3	98,0	133,7	118,3
<b>I. Dalam Negeri</b>	102,5	128,1	107,9	133,9	
<b>II. Luar Negeri</b>	-18,4	-16,8	-9,9	-0,2	

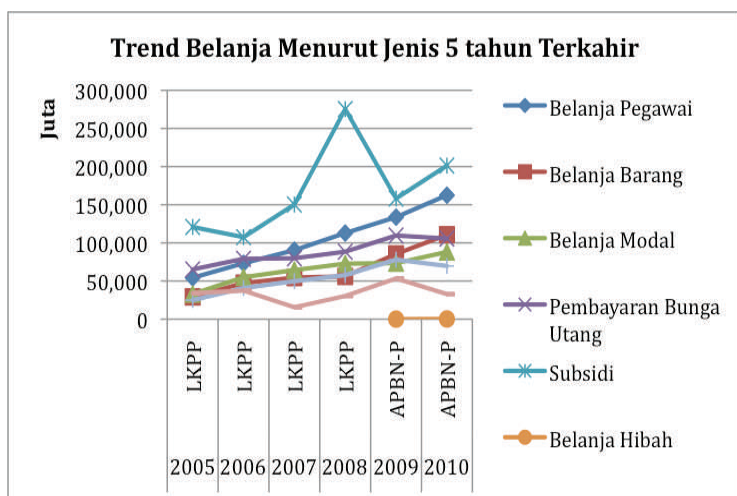
Sumber: Kementerian Keuangan

- **Penerimaan perpajakan diperkirakan meningkat sebesar 839,9 trilyun atau 13 % dari tahun 2010.** Tanpa harus membandingkan penerimaan perpajakan Negara lain yang memiliki perekonomian mirip dengan Indonesia dengan *Tax Ratio* antara 16-19%, secara ratio penerimaan perpajakan tahun 2011 masih jauh dari *tax ratio* pada tahun 2008 yang mencapai hampir 13,5%. Sesungguhnya target penerimaan perpajakan masih jauh dari potensi perpajakan yang dapat diterima Pemerintah. Hal ini juga menggambarkan reformasi perpajakan belum membawa perubahan berarti bagi penerimaan Negara sektor pajak.
- **Untuk memperluas basis pajak pribadi, Pemerintah juga harus memikirkan penggunaan pajak yang *ear marked* untuk menarik minat WP.** Pemerintah dapat mengembangkan system jaminan sosial dari hasil pemotongan pajak, sehingga pembayar pajak pribadi merasakan manfaat langsung membayar pajak. Namun, prasyarat data base single identity number (SIN) wajib dipenuhi terlebih dahulu

- **Meskipun penerimaan Negara secara total naik, justru penerimaan dari sumber daya alam mengalami penurunan**, terutama disebabkan oleh lifting minyak. Hal ini cukup mencurigakan mengingat block cepu sudah mulai berproduksi. Perpres No 26 tahun 2010 tentang Transparansi Pendapatan Negara dan Pendapatan Daerah dari Industri Ekstraktif masih sebatas kebijakan dan belum menjadi mainstream sector pendapatan ekstraktif.

### C. Struktur dan Arah Kebijakan Belanja RAPBN 2011

- Dalam upaya mencapai sasaran pembangunan tahun 2011, **alokasi anggaran belanja negara direncanakan sebesar Rp1.204,9 triliun atau meningkat sebesar 7,0 persen dibanding anggaran belanja negara pada tahun 2010.**
- **Belanja pemerintah pusat tahun 2011 akan mencapai Rp840,9 triliun atau meningkat 7,6 persen dibanding tahun 2010.**
- Sejalan dengan dengan kenaikan belanja negara tahun 2011, **anggaran transfer ke daerah direncanakan sebesar Rp364,1 triliun atau meningkat sebesar 5,6 persen dari tahun 2010.** Kenaikan anggaran transfer ke daerah untuk meningkatkan kemampuan fiskal daerah dan mendukung pembangunan di daerah sesuai dengan prioritas pembangunan nasional
- Pada setiap pengajuan anggaran Pemerintah selalu mengklaim anggaran ke daerah terus ditingkatkan, bahkan pada tahun 2011, pemerintah mengklaim telah meningkatkan anggaran transfer ke daerah 2 kali lipat lebih, dari Rp. 150,4 trilyun pada tahun 2005 menjadi Rp. 364,1 trilyun pada RAPBN 2011. Namun **sebenarnya dibandingkan belanja Negara yang terus meningkat, proporsi belanja transfer ke daerah stagnan dikisaran 30% dari total belanja Negara.** Padahal daerah menerima urusan yang jauh lebih besar dari pusat dan memiliki jumlah pemerintahan 500 lebih. Hal ini yang seharusnya diperjuangkan DPR, ketimbang mengusulkan dana aspirasi yang secara sicara signifikan tidak berpengaruh terhadap proporsi belanja daerah. **Jika porsi anggaran ke daerah masih kecil, tidak mengherankan berapapun besarnya kenaikan APBN tidak akan mampu membantu meningkatkan kesejahteraan rakyat daerah.**
- **Walaupun masih didominasi belanja subsidi, potret belanja Pemerintah Pusat menampilkan wajah yang sangat mengkhawatirkan dalam lima tahun terakhir.** Dari gambaran grafik di bawah ini, secara umum dapat dikatakan ongkos tukang (belanja pegawai) memiliki kecenderungan untuk terus naik, sedangkan pekerjaannya (belanja modal dan barang) justru tidak mengalami kenaikan signifikan. Ongkos tukang naik, akan tetapi



pekerjaan tidak bertambah. Perlu dicatat juga, dari Rp. 107 trilyun belanja barang, Rp. 19,5 trilyun untuk perjalanan dinas (lihat data pokok APBN 2010).

- Pada APBN-P 2010 perubahan anggaran transfer ke Daerah yang paling signifikan mengalami kenaikan adalah dana penyesuaian, sebesar Rp. 13,8 trilyun, sehingga menjadi Rp. 21,1 trilyun atau setara dengan DAK.** Dana penyesuaian pada awalnya digunakan untuk menampung dana kurang bayar dana perimbangan, namun sejak tahun 2008 dana penyesuaian juga digunakan untuk menampung dana *non hold harmless*, serta program-program *ad hoc*. Tahun 2008 dikenal istilah DISP (Dana Infrastuktur Sarana dan Prasarana), tahun 2009 menjadi Dana Penguatan Desentralisasi Fiskal Percepatan Pembangunan Daerah (DPDF PPD) dan pada tahun 2010 ditambah lagi komponen Dana Penguatan Infrastruktur dan Prasarana Daerah (DPIPD), Dana Percepatan Infrastruktur Pendidikan (DPIP). Dana-dana infrastuktur ke daerah ini jelas telah menyalahi UU No 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat Daerah. Karena komponen dana perimbangan yang dikenal dalam UU ini adalah DAU, DBH dan DAK. Serta Dana Otonomi Khusus, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Ketidakjelasan formula penentuan daerah yang memperoleh DPDF PPD dan DPIPD akan menjadi lahan baru bagi calo-calo anggaran di DPR dan Pemerintah untuk menjual kewenangannya kepada Daerah yang menginginkan pengucuran dana ini. **Hal ini semakin menunjukkan bahwa kekuatan lobby politik menjadi penentu daerah memperoleh kucuran anggaran, ketimbang kebutuhan prioritas daerah.**

**Tabel 1. Tambahan Dana Penyesuaian Pada APBN P 2010, Rawan Calo Anggaran (milyar)**

No	Dana Penyesuaian	APBN	APBN-P	Selisih
1	Tambahan Penghasilan Guru PNSD	5.800,0	-	-
2	Dana Insentif Daerah	1.387,8	-	-
3	Kurang Bayar DAK	80,2	-	-
4	Kurang Bayar DISP	32,0	-	-
5	DPDF-PPD	-	7.100,0	7.100,0
6	DPIPD	-	5.500,0	5.500,0
7	DPIP	-	1.250,-	1.250,-
	<b>Total</b>	<b>7.300,0</b>	<b>13.850,-</b>	<b>21.150,-</b>

Sumber : Seknas FITRA, Diolah dari Laporan Panja Banggar Transfer Ke Daerah (28 April 2010)

Sebagai contoh, daerah yang memiliki indeks kapasitas fiskal tinggi dan memiliki indeks kemiskinan rendah di bawah rata-rata Nasional, seperti Kab. Berau dan Kab. Penajam Paser Utara di Kalimantan Timur, justru memperoleh alokasi DPIPD lebih tinggi. Dibandingkan daerah yang memiliki indeks fiskal rendah dan indeks kemiskinan di atas rata-rata Nasional, seperti Kab. Timor Tengah Selatan dan Kupang di Nusa Tenggara Timur. Begitu pula dengan alokasi DPF PPD disamaratakan, sebagaimana digambarkan dalam tabel 2. berikut ini. Tidak mengherankan jika otonomi daerah tidak mampu menjadi pendongkrak kesejahteraan rakyat daerah, dengan pola penganggaran seperti ini.

Tabel 2. Perbandingan Daerah Kaya dan Miskin Yang Menerima Dana Penyesuaian

No	Daerah	Indeks Fiskal	Indeks Kemiskinan	DPIP	DPF PPD
1	Kab. Berau	2.999	0.886	17,335,000,000	4,931,137,019
2	Kab, Penajam Paser Utara	2.935	0.698	24,175,000,000	0
3	Kab Timor Tengah Selatan	0.243	1.857	12,000,000,000	4,931,137,019
4	Kab. Kupang	0.271	1.46	4,835,000,000	0

- FITRA berpandangan pada APBN 2011, *Pemerintah harus menertibkan dana transfer ke daerah pada nomenklatur dana penyesuaian* berdasarkan formula yang mempertimbangkan kondisi kesenjangan daerah termasuk fiskal dan indicator lainnya. Hal ini perlu dilakukan agar dana transfer daerah mencapai tujuannya sebagai instrumen mengatasi kesenjangan antar daerah dalam meningkatkan kesejahteraan di daerah.

#### D. KEBIJAKAN BELANJA RAPBN 2011

Pemerintah menerapkan arah kebijakan belanja 2011 dengan tema *“Percepatan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkeadilan didukung Pemantapan Tata Kelola dan Sinergi Pusat Daerah”* dengan prioritas sebagai berikut:

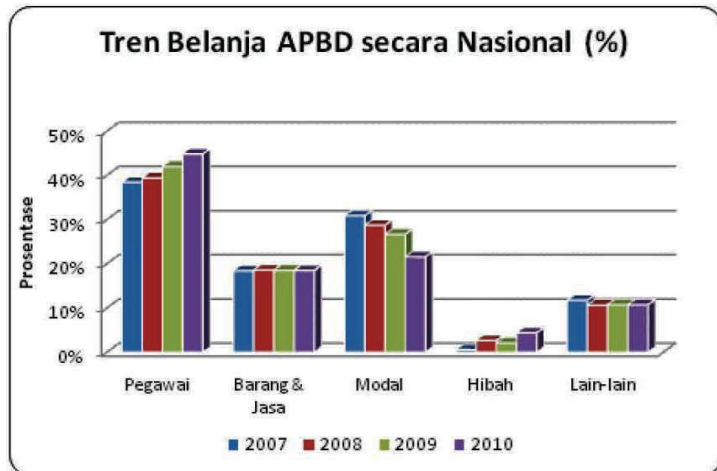
##### Prioritas 1 Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

- *FITRA berpandangan Pemerintah belum memiliki desain dan arah reformasi birokrasi yang jelas.* Reformasi birokrasi dengan pemberian remunerasi terbukti tidak mampu melenyapkan budaya birokrasi yang korup. Reformasi birokrasi justru tidak menghasilkan struktur yang ramping, kaya fungsi dan hemat anggaran yang seharusnya menjadi roh dari reformasi birokrasi. Sebaliknya, Reformasi birokrasi justru melahirkan paradok birokrasi yang gemuk dan tidak efisien serta menelan banyak anggaran. Seperti digambarkan grafik di atas belanja pegawai terus mengalami peningkatan sementara belanja pekerjaan (barang/jasa dan modal) tidak meningkat signifikan. Hal yang sama terjadi di daerah pegawai terus mendominasi, sehingga tidak mengherankan anggaran APBN maupun APBD tidak memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.
- *Lembaga Kepresidenan sebagai lokomotif reformasi birokrasi justru tidak mampu memberikan contoh bagi Kementerian/Lembaga lain.* Kabinet dibentuk semaksimal mungkin dengan memanfaatkan UU No. 39 tahun 2008 tentang Kementerian/Lembaga dengan membentuk kabinet sejumlah 34, untuk mengakomodasi seluruh anggota Koalisi. Tidak cukup sampai disana, Presiden-pun menambah 10 jabatan Wakil Menteri yang sampai saat ini belum jelas pembagiannya dengan Menteri maupun Pejabat Esselon I. Lembaga Kepresidenan juga semakin gemuk dengan struktur. Maka dibentuk lagi, lembaga di lingkungan istana Presiden seperti, staff khusus, staff pribadi, juru bicara, unit kerja, dewan pertimbangan Presiden, satgas mafia hukum hingga tim 8 yang telah berakhir masa jabatannya. Ironinya, pembentukan lembaga-lembaga ini tidak pernah dievaluasi efektifitasnya. Bahkan cenderung menambah beban anggaran Negara. Tercatat, pada

APBN 2010, saat ini Unit Kerja Presiden telah memiliki nomenklatur tersendiri dengan anggaran Rp. 17,1 milyar dan Dewan Pertimbangan Presiden dengan anggaran Rp. 34,5 milyar.

- **Reformasi birokrasi seharusnya mencakup pembenahan kewenangan antara pusat dan daerah yang disertai dengan diskresi fiskal yang memadai.** Meskipun daerah diberikan urusan yang

menjadi kewenangannya yang disertai desentralisasi fiskal, tetapi sebenarnya urusan yang diberikan ke Pemda adalah urusan semu. Karena pada prakteknya desentralisasi fiskal ke daerah telah ditentukan peruntukan alokasi anggarannya oleh Pemerintah dan Kebijakan Pusat. Dari hasil studi Seknas FITRA, rata-rata daerah menghabiskan 80% DAU-nya untuk membayar gaji Pegawai. Keterbatasan ruang gerak fiskal di daerah juga terlihat dari kenaikan belanja pegawai secara prosentase dan nominal



meningkat signifikan, sementara belanja modal terus mengalami penurunan bahkan terendah pada 4 tahun terakhir di tahun 2010. Selain itu daerah juga diwajibkan memberikan 10% dana pendamping DAK yang sudah ditentukan peruntukannya. Daerah juga diharuskan mengalokasikan 20% anggaran untuk pendidikan, dan 10% untuk Kesehatan,. Sementara tidak banyak daerah yang memiliki tumpuan dari DBH, kecuali daerah perkotaan dan penghasil Sumber Daya Alam. **Praktis, sebenarnya daerah tidak memiliki kewenangan dalam memutuskan kebijakan alokasi anggaran atau sekedar tukang catat anggaran yang masuk ke APBD-nya.**

- **DPR juga harus segera mendorong Pemerintah untuk mengalihkan dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan pada tahun 2011, menjadi Dana Alokasi Khusus sebagaimana diamanatkan UU No. 33 tahun 2004.** Pemerintah baru menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang pengaturan hal tersebut empat tahun kemudian melalui PP No 7 tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Dalam PP ini masih mengamankan Dana Dekonsentrasi dan tugas pembantuan dialihkan secara bertahap. Hal ini menunjukkan rendahnya komitmen Pemerintah terhadap desentralisasi yang hanya menyerahkan urusan tanpa kewenangan anggaran.

### Prioritas 2 Pendidikan

- Tahun 2011 adalah tahun ketiga Pemerintah memenuhi 20% anggaran Pendidikan. Pemenuhan anggaran Pendidikan baru terjadi setelah untuk ketigakalinya Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan gugatan PGRI yang melakukan uji materi terhadap UU APBN tahun 2008. MK memutuskan 20% anggaran pendidikan untuk dipenuhi pada APBN 2009. Tak ayal, putusan menjelang pidato kenegaraan ini, merubah struktur RAPBN 2009 secara signifikan. Kebijakan pemenuhan 20% anggaran pendidikan setelah 5 tahun amanat konstitusi berjalan, sebenarnya bukan prestasi menggembirakan Pemerintah terhadap dunia pendidikan. Pasalnya, 20% anggaran pendidikan mengikutsertakan gaji pendidik setelah UU Sisdiknas diajukan *Judicial review*. Selain itu, pemenuhan ini juga sangat kental motif politik menjelang Pemilu 2009 lalu. Pun, masih kontroversial formula 20% anggaran pendidikan yang memasukan dana transfer ke



daerah seperti DAU, DAK dan DBH yang notabene juga diklaim oleh Pemerintah Daerah sebagai bagian 20% anggaran pendidikan dari APBD. Sehingga **20% anggaran pendidikan masih menimbulkan pertanyaan besar, apakah 20% dari APBN dan 20% dari APBD? Atau 20% dari APBN+APBD.**

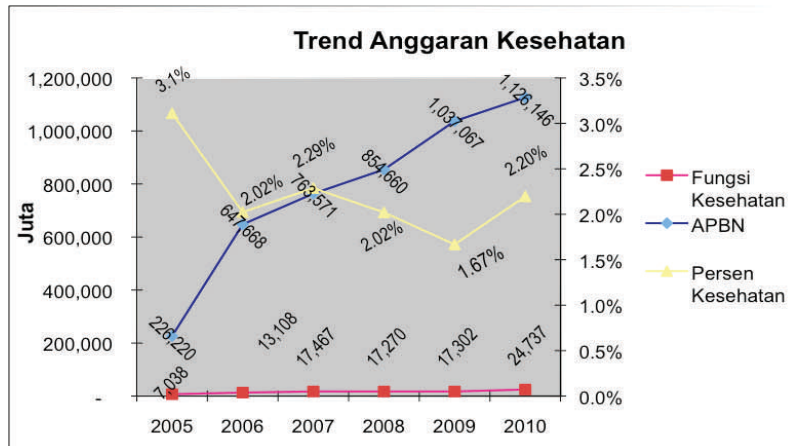
- Terpenuhinya 20% anggaran pendidikan yang sedemikian besar seharusnya sudah menampakkan hasil terhadap akses pendidikan yang luas dan berkualitas. Namun, sayangnya setelah 2 tahun terpenuhi belum terlihat titik terang yang menggembirakan. Bangunan sekolah rusak, banyaknya anak putus sekolah, dan kualitas UN yang semakin meragukan. Kondisi itu menggambarkan masih carut marutnya dunia pendidikan di republik ini. **Semakin besar anggaran pendidikan justru tidak menjadi jaminan terhadap perluasan akses pendidikan yang berkualitas.**
- FITRA berpendapat besarnya anggaran pendidikan yang tidak berdampak signifikan terhadap kualitas pendidikan disebabkan :
  - **Hasil Audit BPK menunjukan dua Kementerian yang memperoleh anggaran pendidikan terbesar yakni, Depdiknas dan Depag justru memperoleh opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP) atau disclaimer dalam 3 tahun terakhir.** Berdasarkan hasil audit BPK semester I 2009 misalnya, ditemukan 24 kasus ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan dengan nilai Rp. 2,2 trilyun dan Departemen Agama sebanyak 39 kasus dengan nilai 2,2 trilyun. Hal ini menggambarkan ketidaksiapan dua kementerian ini terhadap besarnya anggaran yang dikelola. Besarnya anggaran pendidikan di daerah berkorelasi dengan semakin banyak penyimpangan anggaran pendidikan di Daerah. Berdasarkan hasil audit BPK semester II 2009 terhadap pemeriksaan 189 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), 42% atau 80 daerah ditemukan adanya penyimpangan anggaran pendidikan Rp. 900,7 milyar atau mendekati 1 trilyun. Mulai dari aktor Kepala Dinas sampai dengan Kepala Sekolah. Hal ini cukup mengkhawatirkan, besarnya anggaran Pendidikan dengan skema yang tidak akuntabel semakin memperluas aktor-aktor korupsi hingga ke tingkat sekolah.
  - **Pemerintah juga tidak siap dengan grand desain pendidikan murah berkualitas.** Pada RAPBN-P 2010 pemerintah mengajukan tambahan anggaran pendidikan Rp. 11,7 trilyun sehingga menjadi Rp. 221,4 trilyun. Ironisnya, alasan penambahan anggaran pendidikan ini karena meningkatnya total belanja Negara, bukan berdasarkan peta kebutuhan pendidikan. Sehingga tidak terlalu mengherankan tambahan anggaran pendidikan ini tersebar pada Kemendiknas senilai Rp. 6,3 trilyun, Kementerian Agama Rp. 2 trilyun, Kemenhub Rp. 600 M dan Kemenkes Rp. 300 Milyar untuk beasiswa tenaga kesehatan.
  - **Kebijakan alokasi anggaran daerah pendidikan tidak efektif.** Berdasarkan hasil analisis FITRA terhadap 41 kabupaten/Kota umumnya daerah telah memenuhi amanat konstitusi. Persoalannya, 20% anggaran pendidikan lebih banyak dialokasikan untuk belanja tidak langsung.
- **Untuk itu, DPR harus segera mendesak Pemerintah menyusun road map penggunaan 20% anggaran pendidikan,** tidak berdasarkan *budget driven* tapi kebutuhan pasti persoalan pendidikan di Indonesia. Perlu disadari, tidaklah jaminan anggaran pendidikan yang besar dapat mendongkrak kualitas pendidikan negeri ini. Sepanjang penggunaan anggaran tidak efisien dan

efektif. Bukan tidak mungkin bibit-bibit korupsi dilayanan pendidikan semakin bersemi.

### Prioritas 3 Kesehatan

- **Ditetapkannya UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan semestinya menjadi landasan Pemerintah untuk merealisasikan komitmennya terhadap anggaran kesehatan.** Pasal 171 ayat

(1) mengamanatkan “*Besar anggaran kesehatan Pemerintah dialokasikan minimal 5% (lima persen) dari anggaran pendapatan dan belanja negara di luar gaji*”. Namun, layaknya anggaran pendidikan yang baru direalisasikan 5 tahun setelah mandat konstitusi, Pemerintah belum memiliki perhatian serius terhadap sector kesehatan. Grafik ini menunjukkan meskipun

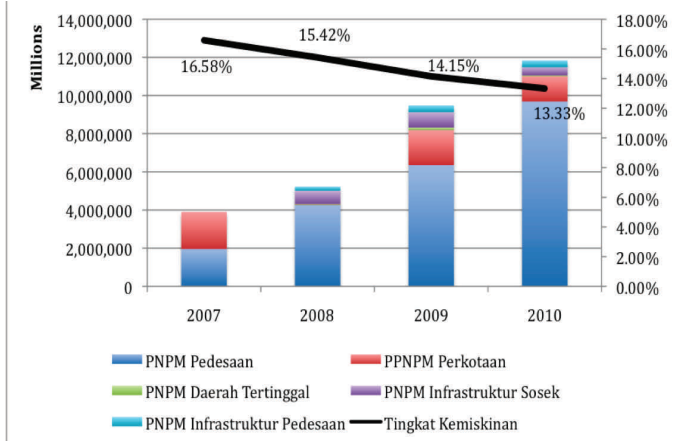


APBN meningkat 5 kali lipat sejak tahun 2005 namun proporsi maupun nominal anggaran kesehatan tidak mengalami kenaikan berarti.

- **Dari hasil perhitungan belanja kesehatan pada APBN-P 2010 dengan memasukan belanja gaji masih jauh dari amanat dalam pasal 171 UU 36/2009.** Porsi belanja Kesehatan pada APBN P 2010, sebagaimana diuraikan dalam tabel 1 masih sebesar 2,2% dari total APBN-P 2010. Selain itu, porsi belanja kesehatan dalam APBN- P 2010 masih jauh dari memadai. Kurang 1% dari PDB. Dibandingkan dengan Philipina yang memiliki pendapatan per kapita lebih rendah dari Indonesia, telah mengalokasikan belanja kesehatannya 3% dari PDB. Padahal, dalam belanja fungsi kesehatan terdapat 5 (lima) indicator MDGs ; Gizi buruk, Kematian Ibu, Kematian Anak, HIV AIDS dan penyakit menular, serta sanitasi air bersih.
- **Mulai tahun 2010, Pemerintah memiliki program Biaya Operasional Kesehatan yang diberikan langsung ke Puskesmas.** Inisiatif ini cukup baik untuk memotong rantai birokrasi, namun pemberian alokasi penyeragaman Rp. 100 juta untuk Puskesmas uji coba atau Rp. 18 juta sampai Rp. 22 juta untuk Puskesmas non uji coba, menunjukkan tidak siapnya pengucuran belanja ini, sehingga masih berorientasi populis semata. FITRA berpandangan DPR perlu mendesak Pemerintah untuk merumuskan formula pemberian BOK untuk setiap Puskesmas berdasarkan isu indikator Puskesmas yang bersangkutan seperti, kasus kematian ibu dan bayi, kasu gizi buruk, penyakit dan lain-lain.
- **FITRA memandang persoalan anggaran kesehatan adalah persoalan ketidakcukupan alokasi anggaran dan efektivitas.** Oleh karena itu, APBN 2011 harus segera merealisasikan anggaran kesehatan 5% dari APBN, jika menginginkan tercapainya target MDGs pada bidang kesehatan yang hanya tersisa 5 (lima) tahun lagi.

**Prioritas 4 Penanggulangan Kemiskinan**

- PNPM diyakini oleh Pemerintah sebagai obat mujarab bagi kemiskinan. Tidak tanggung-tanggung Pemerintah menggenjot dana PNPM dari, 3,9 trilyun tahun 2007 menjadi Rp. 11,8 trilyun di tahun 2010. Bahkan Pemerintah berani mengutang US\$ 744 juta (7,4 T) kepada Bank Dunia untuk program ini. Ironisnya, **efektivitas program PNPM dalam menanggulangi Kemiskinan masih patut dipertanyakan.** Anggaran meningkat berkali-kali lipat namun angka kemiskinan tidak turun signifikan. Tahun 2009 yang merupakan tahun Pemilu, anggaran PNPM meningkat pesat 4,2 trilyun dibanding tahun 2008, yang hanya meningkat 1,3 trilyun. Namun, jika tahun 2008 dibutuhkan anggaran Rp. 543 ribu untuk menurunkan 1 orang miskin, di tahun 2009 justru dibutuhkan anggaran Rp. 2,8 juta untuk menurunkan 1 orang miskin. Ini menunjukkan semakin mahalnya biaya menurunkan 1 orang miskin pada saat angka kemiskinan semakin berkurang. Daerah juga dipaksa yang untuk mengalokasikan Dana Daerah Urusan Bersama (DDUB) sebagai pendamping PNPM yang besarnya antara 20-40% dari dana PNPM yang diterima. Padahal, PNPM bukan merupakan bentuk dana perimbangan maupun dekonsetrasi dan tugas pembantuan. Artinya PNPM juga telah melanggar azas dana perimbangan pada UU 33/2004.*



- FITRA berpandangan DPR harus segera melakukan evaluasi efektivitas PNPM termasuk menghentikan sumber pembiayaan PNPM yang berasal dari utang. DPR harus segera mendesak pemerintah merumuskan unit cost atau Analisa Standar Biaya (ASB) berapa rupiah yang dibutuhkan untuk menurunkan 1 angka kemiskinan.**

**E. PENUTUP**

Sudah saatnya wakil rakyat membangun tradisi baru dalam pembahasan RAPBN 2011 sebagaimana diamanatkan pasal 53 UU No 10 tahun 2004, masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan rancangan undang-undang. Oleh karenanya, pada pembahasan Rancangan Undang-Undang APBN 2011 DPR perlu melakukan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan masyarakat baik pada level komisi-komisi, banda anggaran, Panitia Kerja ataupun fraksi. RDPU dapat menjadi instrumen yang membantu DPR untuk menjalankan fungsi anggaran dalam rangka mewujudkan APBN yang sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, sebagaimana amanat konstitusi.

“SUDAH SAATNYA DPR MEMBANGUN TRADISI BARU DENGAN MELAKUKAN RDPU DENGAN KELOMPOK-KELOMPOK MASYARAKAT DALAM PEMBAHASAN APBN 2011”

Vitamin Anggaran ini diracik oleh :



**Sekretariat Nasional**  
**Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran**

Jl. Guru Alif No. 34 Rt 04 Rw 06 Kel. Duren Tiga, Pancoran Jakarta Selatan 12670

Po. Box. 7244

No. Tlp : 021-7940133. fax : 021-7947608

Email: [seknas\\_fitra@yahoo.com](mailto:seknas_fitra@yahoo.com), [sekretariat@seknasfitra.org](mailto:sekretariat@seknasfitra.org)

Website : [www.seknasfitra.org](http://www.seknasfitra.org) - [www.budget-info.com](http://www.budget-info.com)

**Seknas FITRA terbuka atas undangan RDPU DPR untuk memberikan masukan dalam rangka pembahasan RAPBN 2011**